

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU PROVINSI LAMPUNG: LIMA PERKARA PILKADA 2024 DI LAMPUNG TELAH DIPUTUS MK, SATU LANJUT KE SIDANG PEMBUKTIAN**

**BANDAR LAMPUNG, 06 Februari 2025** - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan terhadap lima perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa dan Rabu, 4–5 Februari 2025, di Gedung MK Jakarta.

Dari hasil rekapitulasi yang dirilis oleh Bawaslu Provinsi Lampung, tercatat sebanyak empat perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sementara satu perkara lainnya dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

Empat perkara yang tidak dapat diterima tersebut meliputi:

1. Kabupaten Mesuji dengan nomor perkara 39/PHPU.BUP-XXIII/2025,
2. Kabupaten Tulang Bawang dengan nomor perkara 48/PHPU.BUP-XXIII/2025,
3. Kabupaten Pesisir Barat dengan nomor perkara 38/PHPU.BUP-XXIII/2025,  
dan
4. Kabupaten Pringsewu dengan nomor perkara 147/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sementara itu, Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan lanjut ke sidang pembuktian, setelah Mahkamah menilai masih terdapat materi permohonan yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa Bawaslu menghormati sepenuhnya seluruh proses dan hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, proses perselisihan hasil Pilkada



di MK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang dijamin oleh konstitusi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan.

“Bawaslu Provinsi Lampung menghormati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan dalam sidang pleno tersebut. Ini merupakan wujud nyata dari tegaknya prinsip negara hukum, di mana setiap proses demokrasi memiliki ruang penyelesaian yang sah secara konstitusional,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk memastikan seluruh proses hukum dan administratif berjalan dengan tertib, transparan, serta akuntabel.

“Kami terus berkomunikasi dengan jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai koridor hukum. Bawaslu tetap memegang prinsip independensi dan profesionalitas dalam mengawal hasil Pilkada 2024 hingga seluruh proses selesai,” tambahnya.

Menurutnya, hasil sidang MK ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam memperkuat kapasitas pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa ke depan. Pengalaman dalam proses Pilkada 2024, termasuk perkara yang berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi, menjadi pembelajaran penting dalam upaya memperkuat keadilan pemilu dan kualitas demokrasi di Lampung.

“Kami menjadikan dinamika dan putusan MK ini sebagai refleksi dan pembelajaran. Bawaslu akan terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas di semua tingkatan, agar pengawasan di masa mendatang semakin kuat, terukur, dan berintegritas,” kata Iskardo.

Bawaslu Provinsi Lampung juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang telah turut menjaga kondusivitas pasca pelaksanaan Pilkada 2024.



“Kita patut bersyukur, seluruh proses Pilkada di Lampung dapat berjalan dengan aman dan damai. Meski ada dinamika sengketa hasil, semua pihak tetap menempuh jalur hukum dengan tertib dan beradab. Ini adalah cerminan kedewasaan politik masyarakat Lampung,” ujar Iskardo menutup pernyataannya.

Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses tahapan pemilihan hingga tuntas, serta memastikan seluruh keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak terkait.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**